

## Sekeluarga Sembuh dari Covid-19

**GROBOGAN (KR)** - Jumlah warga Kabupaten Grobogan yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 pada Kamis (12/11) siang ada lima orang. Empat di antaranya merupakan satu keluarga yang berasal dari Kecamatan Purwodadi. Mereka adalah perempuan usia 63 dan 33 tahun, pria usia 33 tahun, serta anak usia empat tahun. "Keempatnya dinyatakan positif Covid-19 pada Oktober 2020 lalu. Selama ini keempatnya menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan satu pasien sembuh lainnya adalah perempuan usia 29 tahun asal Kecamatan Gubug yang sebelumnya juga menjalani perawatan di rumah sakit," ungkap Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Grobogan, Ir Endang Sulistyoningstih MT.

Selain ada 5 orang dinyatakan sembuh, pada hari sama ada dua kasus baru Covid-19. Yaitu, pria usia 55 tahun asal Kecamatan Pulokulon. Yang bersangkutan saat ini dirawat di RSUD Wongsonegoro Semarang, dan pria usia 37 tahun asal Kecamatan Purwodadi yang dirawat di RSU Moewardi Solo. Sedangkan pasien positif Covid-19 yang meninggal pada hari sama nihil. Dengan perkembangan ini, maka total kasus positif Covid-19 di Grobogan mencapai 652 orang. Sebanyak 525 orang dinyatakan sembuh, 93 meninggal, 22 orang menjalani isolasi mandiri, dan 12 orang dirawat di rumah sakit. (Tas)

## Pembangunan Bendung Guntur Belum Penuhi Target

**PURWOREJO (KR)** - Proyek strategis nasional (PSN) pembangunan Bendung Guntur di Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo hingga kini masih jauh dari target yang harus dicapai. Masalah pembebasan lahan juga menjadi faktor utama keterlambatan pembangunan itu. Proyek nasional ini dikerjakan bersama PT Brantas Abipraya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Waskita Karya yang diharap bisa melakukan komunikasi intens dengan masyarakat, Pemkab Purworejo, BBWS dan BPN untuk menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

"Kami sekarang sedang mengerjakan paket satu yakni mengerjakan akses jalan dan terowongan," kata Project Manager PT Brantas Abipraya (Persero) Rakhmad Cahyana, Jumat (13/11). Di sela-sela menerima kunjungan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Purworejo Ir Yuni Astuti MA, Rakhmad Cahyana menjelaskan, bahwa hingga saat ini progres pengerjaan paket satu baru mencapai 6 persen. "Angka ini masih jauh dari target, yang seharusnya sudah mencapai 15 persen," akunya. Dikatakan masalah pembebasan lahan masih menjadi faktor utama keterlambatan, sehingga pihaknya belum bisa bekerja secara maksimal. Untuk saat ini, pihaknya hanya dapat bekerja pada area yang telah disewa. (Nar)

## Relawan jalani Rapid Test

**BOYOLALI (KR)** - Gunung Merapi telah dinaikkan status dari Waspada atau Level II menjadi Siaga atau Level III beberapa waktu lalu. Kondisi saat ini sudah terdapat warga dengan kategori kelompok rentan yang berada di kawasan rawan bencana (KRB) III. Salah satu persiapan lain dengan mengevakuasi warga bila aktivitas Gunung Merapi meningkat. Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali, Kurniawan Fajar Prasetyo, mengatakan pihaknya bersama sukarelawan sejumlah 200 orang dari berbagai unsur akan bersiaga di sekitar KRB. "Seluruh relawan akan mendatangi posko lapangan di Kecamatan Selo untuk menerjunkan 200 personel terkait dengan siaga Gunung Merapi," ungkap Kurniawan saat ditemui di kantornya, Kamis (12/11).

Tugas dari para surelawan tersebut antara lain membantu distribusi logistik, membantu mengevakuasi masyarakat jika memungkinkan, membantu lalu lintas di jalur evakuasi, membantu di bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Semua sukarelawan yang dikirim merupakan personel terbaik yang memiliki bidang keahlian tersendiri. "Semuanya yang datang ke lokasi adalah yang berspesialisasi khusus dan sudah kita terapkan dari awal," terangnya. Sebanyak 20 posko yang berada di Dukuh Stabelan, Bakalan dan Sepi akan dijaga oleh sukarelawan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. (\*-1)

## Bantuan Belum Turun, Warga 'Bantingan' Beli Lauk Pauk

**KLATEN (KR)** - Warga pengungsi di tempat evakuasi sementara (TES) Desa Balerante, Kemalang, Klaten dalam tiga hari terakhir harus 'bantingan' untuk membeli sayur dan lauk-pauk. Hal itu dikarenakan bantuan uang lauk-pauk dan sayuran Rp 2 juta dari BPBD sudah habis digunakan, sementara hingga Kamis (12/11) belum ada bantuan tambahan. Pantauan KR di dapur umum Balerante, untuk beras masih tersedia cukup banyak, dropping dari BPBD dan juga tambahan bantuan dari Kapolda Jateng. Namun demikian, untuk kebutuhan lauk-pauk setiap harinya tidak memiliki stok baik berupa barang atau uang. Untuk makan hari pertama, relawan dapur umum mencari sayur-mayur di kebun. Mereka mengumpulkan nangka, labu siam, pepaya dan sayur mayur lainnya untuk dimasak di dapur umum.

Perangkat Desa Balerante Jaiu, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa uang bantuan lauk-pauk sebesar Rp 2 juta sudah habis. "Betul, sudah tiga hari ini bantingan, dan tadi kami cari pinjaman Rp 2 juta untuk mengatasi agar bisa menyediakan makan buat warga, apalagi sekarang yang mengungsi semakin banyak. Sampai Rabu malam sudah 126 orang. Mereka makan 3 kali sehari. Tidak mungkin kami kasih mie instan terus," kata Jaiu. (Sit)



KR-Sri Warsiti

Pengungsi makan di dapur umum TES Balai Desa Balerante.

## TUJUH DAERAH DINYATAKAN ZONA MERAH

# Ganjar Minta Kepala Daerah Gencarkan Testing

**SEMARANG (KR)** - Satgas Covid-19 pusat menetapkan per 8 November 2020 ada tujuh daerah yang masuk zona merah covid 19. Untuk itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo minta kepada kepala daerah yang wilayahnya masuk zona merah Covid-19 untuk meningkatkan testingnya.

Demikian dikatakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kepada wartawan Kamis (13/11), usai rakor Daring yang dipimpin langsung oleh Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan via zoom di Puri Gedeh.

Ganjar minta kepala daerah tidak perlu takut akan terjadi lonjakan jumlah penderita covid, jika dilakukan testing secara masif. "Sekarang kita kejar terus peningkatan testing. Kepala Daerah harus lebih peduli," tegas Ganjar. Ganjar juga mengungkapkan adanya salah satu kepala daerah yang meminta agar dibantu dikirimkan Polymerase Chain Reaction (PCR). Padahal sebenarnya, kata Ganjar, daerah

tersebut bisa membeli sendiri karena harganya juga masih terjangkau. Kepala daerah bisa beli PCR sendiri, dan melakukan testing sendiri.

Ganjar menegaskan, pemerintah di Kabupaten Kota saat ini harus bisa bersikap antisipatif dan prediktif, dengan memprioritaskan kelompok rentan yang memiliki komorbid. "Jadi tiap kabupaten kota kita minta untuk peduli, nggak papa tes makin banyak maka akan lebih banyak juga yang diketahui, setelah diketahui maka langkah selanjutnya adalah dijaga supaya sembuh," tegasnya.

Saat Rakor bersama Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan terungkap bahwa kasus Covid-19 di Jateng naik 49 persen pada periode 26 Oktober-1 November, yaitu saat libur panjang. Meski demikian kenaikan tersebut masih sebanding dengan jumlah tesnya.

"Kita sudah prediksi akan terjadi ledakan, karena memang ini resiko yang kita siap ambil. Kami juga su-

dah sampaikan kepada staff, maka tolong ini gaspol. Semua dilakukan termasuk testing," tutur Ganjar. Dari data yang ada, pada 8 November lalu angka testing sempat menurun

hampir separuh dari rata-rata harian di Jateng. Namun, sejak tanggal 9 sampai hari ini jumlah test ada di angka 8.000 sampai 9.000 tes/hari. (Bdi)



KR-Budiono

Ganjar Pranowo saat Rakor covid secara Daring bersama Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan, di ruang kerjanya.

# Denda Pelanggaran Prokes Terkumpul Rp 16 Juta

**PURWOREJO (KR)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo terus menggenjatkan operasi yustisi protokol kesehatan (prokes) demi mencegah persebaran Covid-19.

Pemkab memberi sanksi kepada para pelanggar dengan mengenakan denda dan sanksi sosial untuk guna efek jera. Bahkan, nilai denda yang dihimpun Pemkab mencapai Rp 16 juta. "Jadi dalam Perbup 61 Tahun 2020, disebutkan bahwa pemerintah menerapkan sanksi sosial dan administratif. Denda masuk dalam administratif," kata Kepala Satpol PP dan Damkar Purworejo Budi Wibowo, kepada KR, Kamis (12/11).

Sanksi diberikan sesuai dengan subjek yang melanggar prokes.

Apabila pelanggar adalah pelajar atau warga lanjut usia, mereka diberi sanksi sosial dengan diminta membaca naskah Pancasila, menyanyi lagu perjuangan atau nasional, menghafal sepuluh program PKK, dan hukuman fisik berupa push up bagi pelajar dan pemuda.

Menurutnya, sanksi akan dipertegas apabila pelanggaran masih terjadi setelah dilakukan operasi penertiban tahap pertama. "Jika operasi gabungan dan masih ada pelanggaran, mereka bisa

dikenakan sanksi lebih tegas, bisa berupa denda minimal Rp 10 ribu dan maksimal Rp 50 ribu," tuturnya.

Uang denda yang dihimpun sejak 12 Juli 2020 hingga 5 November 2020 itu disetorkan ke kas daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Denda berasal dari 1.083 pelanggar yang diberi sanksi administrasi. "Sepanjang empat bulan operasi, terdapat 1.750 pelanggar, selain yang kena administrasi, ada 667 disanksi sosial," tuturnya.

Kasi Operasional dan Pengendalian (Opsdal) Satpol PP dan Damkar Agus Pramono mewakili Kasatpol PP dan Damkar menambahkan, operasi yustisi dilak-

sanakan setiap hari. Operasi dilakukan dengan sasaran pusat keramaian di 16 kecamatan. "Setiap hari rata-rata kami melakukan operasi di dua lokasi," ucapnya.

Dijelaskan, penindakan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap setiap pelanggar. Meski demikian, pelaksanaan operasi tetap mengedepankan sisi humanis dan edukasi kepada pelanggar protokol.

"Terus perangi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan, masyarakat harus sadar bahaya dan penularan virus itu, sehingga berupaya mencegah agar tidak sampai terpapar," tandasnya. (Jas)

## Kapolda Jateng Kunjungi Pengungsi

**BOYOLALI (KR)** - Kapolda Jateng Irjen Pol Drs Ahmad Luthfi didampingi Kapolres Boyolali, AKBP Rachmad Nur Hidayat melaksanakan kunjungan kerja di Tempat Penampungan Pengungsian Sementara (TPPS) Gunung Merapi di Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jateng, Rabu (11/11). Kunjungan kerja dilakukan untuk memastikan kebutuhan pengung-

si, terlebih sebagian besar pengungsi yang merupakan kelompok kaum rentan yang telah dievakuasi sejak Senin (9/11) lalu.

Dalam kunjungannya, Kapolda menyerahkan bantuan peralatan tidur, peralatan mandi, sembako dan kebutuhan untuk balita. "Kita siapkan busa tidur untuk masyarakat yang mengungsi, peralatan mandi, sembako dan kebutuhan balita," kata



KR-Mulyawan

Kapolda Jateng Kunjungi Pengungsi di Tlogolele Boyolali.

Kapolda saat meninjau lokasi, Rabu (11/11) petang. Selain peralatan tidur, sembako, peralatan mandi dan kebutuhan balita Kapolda juga menyiapkan layanan kedokteran kesehatan (Dokkes) dari Polda Jateng di back up dari Polres Boyolali untuk penanganan masyarakat di pengungsian.

"Kita sudah siapkan Dokkes dari Polda Jateng di Back Up dari Polres Boyolali di tempat pengungsian sementara," ujar Kapolda.

Pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jawa Tengah serta Kabupaten dan relawan. Saya sudah kerja sama dengan BNPB maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab), sehingga masyarakat bisa terjaga kesehatannya. (\*-1)

## Jawadhis, Program Kewirausahaan Sosial UMP

**PURWOREJO (KR)** - Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP) Dr Rofiq Nurhadi MAg bertekad mewujudkan UMP sebagai perguruan tinggi kewirausahaan sosial. Untuk mencapai tujuan ini perlu adanya keberlanjutan dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D).

"PHP2D merupakan program dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Dikti Kemendikbud RI. Tahun ini UMP lolos dua tim dan mendapat pendanaan," katanya, Jumat (13/11). Di sela-sela lokakarya kewirausahaan sosial di ruang seminar kampus timur UMP Rofiq Nurhadi menjelaskan bahwa UMP juga telah memiliki program Tim Jawa Gendhis (JAVADHIS) dari Unit Kegiatan Mahasiswa Sainstek dan Oemah Cendekia oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Tim ini melakukan pendampingan kepada pengrajin gula Jawa diantaranya di Desa Jatirejo Kecamatan Kaligesing. Pada lokakarya yang digelar di Ruang Seminar Kampus Timur UMP ini, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr Budi Setiawan MSi menambahkan, bahwa kewirausahaan sosial menekankan socio responsibility/ tanggung jawab sosial yang merupakan hal penting dalam berwirausaha. "Sebetulnya kalau kita bicara tentang kewirausahaan sosial itu, sejalan dengan apa yang diharapkan dari PHP2D, yakni memberikan dampak sosial dan lingkungan," katanya seraya berharap PHP2D JAVADHIS ini tidak hanya kesukarelaan, tapi bagaimana bisa menjadi seorang sociopreneur wirausaha sosial. Ada potensi profit, juga ada dampak sosialnya. (Nar)

## SEJAK 2016 BARU 7684 PENDAFTAR

# Kememparekraf Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

**MAGELANG (KR)** - Masih minimnya pelaku usaha disektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggelar sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran HKI ke sejumlah daerah.

Dari data Kememparekraf, sejak 2016 lalu, baru ada 7684 pelaku usaha yang sudah terdaftar dan memiliki kekayaan intelektual (KI). "Ada beberapa faktor penyebab minimnya pendaftar itu. Di antaranya masih minimnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha kreatif memanfaatkan HKI dan proses pendaftarannya," kata Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi Kememparekraf, DR Ir Ahmad Rekotomo, saat sambutan pada pembukaan acara sosialisasi dan fasilitasi HKI di Hotel Atria Kota Magelang, Kamis (12/11).

Rekotomo menyampaikan pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor penggerak dan daya ungkit untuk mewujudkan

Indonesia yang mandiri dan makmur. Untuk sasaran jangka panjang pertumbuhan ekonomi berbasis Kekayaan Intelektual (KI).

"Saat ini, kebutuhan akan hak kekayaan intelektual menjadi sebuah keharusan. Tujuannya agar si pemilik memiliki hak untuk mengelola kekayaannya secara bebas. Untuk kegiatan ini, Kememparekraf menggandeng, UNS dan Kemenkumham," lanjutnya.

Ditambahkan Direktur Fasilitas Kekayaan Intelektual Kememparekraf, Dr Ir Robinson Sinaga, selama empat tahun ini atau sejak 2016 lalu, baru ada 7684 pelaku usaha yang terdaftar.

Rinciannya, tahun 2016 ada (1172 pendaftar), 2017 ada (1805 pendaftar), 2018 ada (2693) dan tahun 2019, ada (1984). "Untuk tahun 2020 ini, target ada 1250 orang. Mereka akan disasar di delapan kota di Indonesia. Di antaranya di Kota Palu, Kupang, Gianyar, Banyuwangi, Manado dan lainnya," imbuhnya. Sementara Ketua Pelaksana

dari UNS (Universitas Sebelas Maret Surakarta), Agus Tri Haryanto mengatakan, yang difasilitasi untuk kegiatan ini adalah hak cipta, merk dan desain industri.

"Dari delapan kota yang disasar program ini tahun 2020, kami melakukan di empat kota. Yaitu Palu, Kupang, Gianyar dan Magelang. Target kami akan mendapatkan 375 kekayaan intelektual

yang terdaftar. Untuk di Magelang, kami targetkan ada 93 pendaftar," jelasnya.

Bupati Magelang, yang diwakili Kepala Bappeda dan Litbangda, drs Sugiyono mengapresiasi kegiatan ini. "Kami mengapresiasi kegiatan ini. Karena dengan hak kekayaan intelektual para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif diakui, mereka menjadi lebih bebas berkreatasi," pungkasnya. (Bag)



KR - Bagyo Harsono

Sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual tahun 2020.